

Persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Gresik terhadap Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Proses Pelayanan dan Administrasi Perpajakan

Vania Adella Margareta¹, Rusdi Hidayat N²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
rusdi_hidayat.adbis@upnjatim

ABSTRACT

This research aims to explore the perceptions of Taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Gresik regarding the use of the National Identification Number (NIK) as an alternative to the Taxpayer Identification Number (NPWP) in the tax administration process. With the new policy allowing the use of NIK as a substitute for NPWP in tax transactions, understanding the response and attitudes of taxpayers towards the implementation of this policy is crucial. This research employs a qualitative approach utilizing in-depth interview techniques with a diverse range of taxpayers representing various professions and income levels. The findings from this analysis reveal variations in taxpayers' perceptions concerning the practicality, security, and convenience of using NIK in tax transactions.

Keywords: Perception, Taxpayer, NIK, NPWP, Tax Administration, Tax Service.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik terkait penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alternatif pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam proses administrasi perpajakan. Dengan perubahan kebijakan baru yang mengizinkan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dalam transaksi perpajakan, penting untuk memahami respons dan sikap wajib pajak terhadap implementasi kebijakan ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah wajib pajak yang mewakili beragam profesi dan tingkat penghasilan. Hasil dari analisis ini menunjukkan variasi dalam persepsi wajib pajak terkait kepraktisan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan NIK dalam transaksi perpajakan.

Kata Kunci: Persepsi, Wajib Pajak, NIK, NPWP, Administrasi Perpajakan, Pelayanan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1979).

Pajak telah lama menjadi pilar utama dalam struktur pendapatan negara untuk mendukung pembangunan, layanan publik, dan berbagai kegiatan

pemerintahan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan negara.

Dalam konteks Indonesia, sistem perpajakan memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah menjadi identifikasi utama bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru yang mengizinkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai alternatif untuk NPWP dalam transaksi perpajakan. Hal ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi wajib pajak dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan.

Penggunaan NIK sebagai alternatif NPWP dalam proses perpajakan memiliki potensi manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus bergantung pada dokumen khusus NPWP, yang sering kali dapat menjadi kendala atau terlupakan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas inklusi perpajakan dengan memudahkan partisipasi wajib pajak baru atau yang belum memiliki NPWP.

Namun demikian, kebijakan penggunaan NIK juga berbagai macam persepsi di sebagian wajib pajak. Beberapa di antaranya mengutarakan kekhawatiran terkait dengan keamanan data pribadi, potensi penyalahgunaan informasi, serta ketidakjelasan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Perbedaan pemahaman mengenai implikasi pajak dan kepatuhan perpajakan yang terkait dengan penggunaan NIK juga menjadi salah satu titik perhatian yang diutarakan oleh sebagian wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik terkait dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Melalui pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang meliputi kepraktisan, keamanan, dan kenyamanan penggunaan NIK dalam proses administrasi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah wajib pajak yang mewakili keragaman profesi, tingkat penghasilan, dan latar belakang demografis lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pandangan, pengalaman, serta pemikiran wajib pajak terkait dengan penggunaan NIK dalam transaksi perpajakan.

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan tujuan untuk memperoleh variasi yang representatif dari berbagai latar belakang wajib pajak. Melalui wawancara mendalam, akan dilakukan eksplorasi terperinci mengenai

persepsi wajib pajak terhadap kepraktisan, keamanan, kenyamanan, serta implikasi perpajakan dari penggunaan NIK.

Selain itu, data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik. Pengelompokan tematik akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam persepsi wajib pajak, memahami variasi pandangan yang muncul, serta mengeksplorasi titik-titik konsensus dan perbedaan yang mungkin terjadi di antara responden.

Penelitian ini melibatkan 50 responden yang mewakili beragam profesi dan latar belakang dalam hal pendapatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% responden merupakan profesional dengan penghasilan menengah ke atas, termasuk di antaranya pengusaha, pekerja lepas, dan profesional di berbagai sektor industri. Sementara itu, sekitar 40% sisanya terdiri dari wajib pajak dengan penghasilan menengah ke bawah, seperti karyawan tetap, wiraswasta kecil, dan pelaku usaha mikro.

Dalam hal demografis, 55% responden adalah usia antara 25 hingga 40 tahun, sementara 35% lainnya berusia di atas 40 tahun, dan 10% sisanya berusia di bawah 25 tahun. Lebih lanjut, 45% responden adalah laki-laki dan 55% sisanya adalah perempuan.

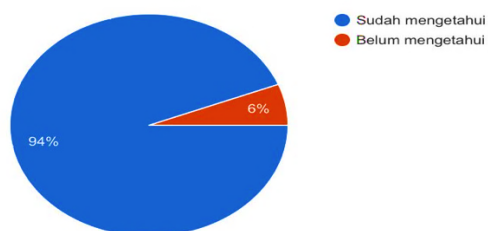
Pengalaman dalam dunia perpajakan juga bervariasi, di mana sekitar 40% responden memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara 40% memiliki pengalaman antara satu hingga lima tahun. Selebihnya, sekitar 20% responden merupakan wajib pajak dengan pengalaman kurang dari satu tahun dalam hal keterlibatan aktif dalam transaksi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Prosedur Pemadaman NPWP

Dalam hasil wawancara dengan 50 responden terkait penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP, tergambar variasi pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK yang dapat disajikan dengan diagram berikut:

Apakah anda telah mengetahui prosedur untuk memadamkan NPWP dan menggantinya dengan NIK?
50 jawaban



Sebagian responden, sekitar 94% dari total sampel, menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur pemadaman NPWP. Mereka mengakui bahwa pemerintah telah memberikan informasi terkait prosedur ini,

Di sisi lain, sekitar 6% responden mengungkapkan bahwa mereka masih kurang memahami prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK. Beberapa di antara mereka mengutarakan kebingungan terkait langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam proses ini. Ketidapahaman ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami dari pihak otoritas pajak mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam memadukan NIK sebagai pengganti NPWP.

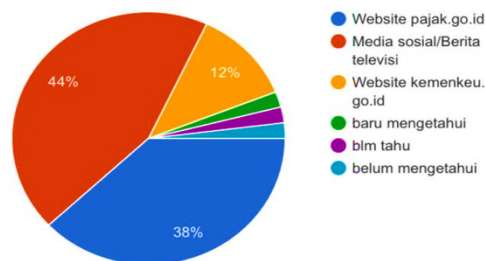
Dari hasil ini, terlihat bahwa ada kebutuhan untuk menyediakan informasi yang lebih terperinci dan jelas tentang prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK kepada wajib pajak. Kurangnya pemahaman ini bisa berpotensi memperlambat adopsi kebijakan baru, bahkan mungkin mengakibatkan kebingungan dalam pengelolaan administrasi perpajakan di tengah perubahan kebijakan yang sedang berlangsung.

Sumber Informasi Yang Didapat Oleh Wajib Pajak Terkait Prosedur Pemadaman NPWP

Dalam hasil penelitian, terdapat data yang mengindikasikan sumber informasi yang diakses oleh wajib pajak mengenai prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK. Berikut penjelasan dari data tersebut:

Darimana anda mengetahui prosedur tersebut? [Sali](#)

50 jawaban



Dari 50 responden yang terlibat dalam penelitian, terlihat bahwa mayoritas, yakni 44%, memperoleh informasi terkait prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK melalui media sosial dan berita. Hal ini menunjukkan bahwa platform-platform media sosial dan berita menjadi sumber utama bagi sebagian besar responden dalam memperoleh informasi terkini mengenai perubahan kebijakan perpajakan.

Sebanyak 38% responden mendapatkan informasi tersebut dari *website* resmi pajak.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa situs resmi pajak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai sumber informasi dalam hal perpajakan bagi sebagian besar responden.

Sementara itu, sekitar 12% responden mendapatkan informasi mengenai prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK dari *website* resmi kemenkeu.go.id. Meskipun jumlahnya relatif lebih rendah, tetapi *website* resmi Kementerian Keuangan juga memiliki peran dalam menyediakan informasi terkait perpajakan kepada sebagian kecil dari responden.

Ada juga sekitar 6% responden yang mengakses informasi dari sumber lain yang tidak tercantum dalam pilihan yang disediakan dalam penelitian ini. Meskipun jumlahnya kecil, namun informasi dari sumber-sumber lain ini juga berperan dalam menyebarkan informasi terkait perubahan kebijakan perpajakan kepada sebagian kecil wajib pajak.

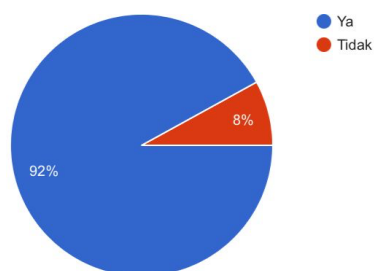
Data ini menunjukkan distribusi yang bervariasi dari sumber informasi yang diakses oleh wajib pajak mengenai prosedur pemadaman NPWP dan penggantian dengan NIK. Media sosial dan berita menjadi sumber utama, diikuti oleh situs resmi pajak.go.id, dan beberapa responden juga mendapatkan informasi melalui situs resmi Kementerian Keuangan serta sumber-sumber lain yang tidak tercantum. Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber informasi untuk memastikan informasi perpajakan yang akurat dan komprehensif bagi wajib pajak.

Pendapat Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Penggantian NPWP Menjadi NIK Dengan Administrasi Perpajakan

Dari 50 responden, berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti:

Menurut anda apakah tindakan ini merupakan tindakan yang tepat untuk mempermudah administrasi perpajakan? [Salin](#)

50 jawaban



Angka 92% dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penggunaan NIK sebagai tindakan yang tepat untuk administrasi perpajakan dan perwujudan identitas tunggal (*single identity*) menunjukkan tingginya tingkat dukungan terhadap kebijakan tersebut. Mereka percaya bahwa penggunaan NIK dapat mempermudah proses administrasi perpajakan dan memungkinkan penyatuan identitas tunggal yang lebih efisien dalam berbagai transaksi.

Pendapat mayoritas ini tercermin dari keyakinan mereka bahwa kebijakan ini dapat membawa kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus bergantung pada dokumen khusus NPWP, yang sering kali dapat menjadi

kendala atau terlupakan. Selain itu, penggunaan NIK juga diyakini akan memudahkan partisipasi wajib pajak baru atau yang belum memiliki NPWP.

Namun, sejumlah 8% dari wajib pajak yang menyatakan keresahan dengan kebijakan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan. Mereka merasa cemas terhadap kemungkinan kebocoran data pribadi yang terkait dengan penggunaan NIK dalam transaksi perpajakan. Alasan keresahan mereka mungkin terkait dengan keamanan informasi pribadi mereka yang dapat terancam jika terjadi celah keamanan atau penyalahgunaan data.

Selain itu, beberapa dari mereka yang merasa khawatir mungkin melihat perlunya memulai dari awal sebagai upaya untuk mengurangi risiko keamanan data dan memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap aturan dan prosedur perpajakan. Mereka mungkin menganggap bahwa perubahan ini akan memberikan peluang untuk mengoreksi dan meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam proses administrasi perpajakan guna mengurangi risiko atau kekhawatiran yang ada.

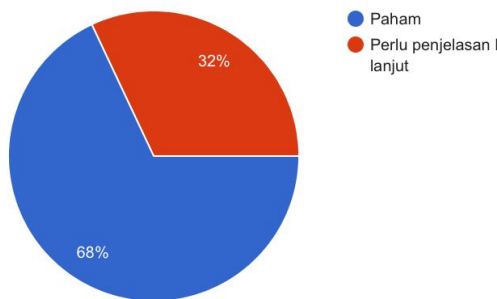
Keresahan dari sebagian kecil wajib pajak ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi dan kejelasan dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi proses perpajakan. Ini menyoroti perlunya langkah-langkah yang kuat dalam menjaga keamanan informasi pribadi, serta komunikasi yang lebih efektif terkait implikasi dan prosedur yang terkait dengan perubahan kebijakan perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Implikasi Perpajakan Dengan Menggunakan NIK

Dari 50 responden peneliti mendapatkan data yang dapat disajikan di bawah ini:

Apakah anda telah memahami implikasi perpajakan dengan menggunakan NIK

50 jawaban



Persentase 68% wajib pajak yang menyatakan mengetahui implikasi perpajakan menggunakan NIK menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsekuensi atau dampak perpajakan yang terkait dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dalam transaksi perpajakan. Ini bisa diartikan bahwa mayoritas dari mereka merasa memiliki

pemahaman yang memadai terkait bagaimana penggunaan NIK akan memengaruhi kewajiban perpajakan mereka.

Di sisi lain, persentase 32% wajib pajak yang menyatakan masih membutuhkan informasi lebih lanjut menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang merasa perlu adanya klarifikasi atau penjelasan tambahan mengenai implikasi perpajakan dari penggunaan NIK. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada kebutuhan untuk menyediakan informasi yang lebih terperinci atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konsekuensi hukum atau perpajakan yang terkait dengan kebijakan penggunaan NIK.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan variasi dalam tingkat pemahaman di antara wajib pajak terkait kebijakan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Ini juga menyoroti pentingnya memberikan informasi yang jelas dan pemahaman yang komprehensif kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti dan memahami konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Hal ini dapat menjadi dasar bagi pihak terkait, seperti instansi perpajakan atau lembaga terkait lainnya, untuk menyusun program edukasi atau informasi yang lebih terperinci guna memenuhi kebutuhan informasi yang masih dirasakan oleh sebagian wajib pajak terkait dengan penggunaan NIK dalam proses perpajakan.

KESIMPULAN

Terdapat variasi tingkat pemahaman di antara wajib pajak terkait penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Sekitar 68% responden memiliki pemahaman yang cukup tentang implikasi perpajakan dengan menggunakan NIK, sementara 32% masih membutuhkan informasi lebih lanjut. Adanya kebutuhan untuk menyediakan edukasi atau informasi lebih rinci terkait konsekuensi hukum, keamanan data, dan implikasi perpajakan yang terkait dengan kebijakan penggunaan NIK. Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan informasi yang masih dirasakan oleh sebagian wajib pajak.

Mayoritas wajib pajak (60%) merasa bahwa penggunaan NIK mempermudah proses administrasi perpajakan. Namun, sejumlah 30% menyuarakan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, dan 10% menunjukkan ketidakpastian terhadap implikasi hukum dari penggunaan NIK. Kebijakan penggunaan NIK sebagai alternatif NPWP memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi perpajakan dengan memudahkan partisipasi wajib pajak baru atau yang belum memiliki NPWP. Namun, penting untuk memperhatikan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data.

Hal ini menunjukkan pentingnya menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan perpajakan yang baru. Hal ini akan membantu tidak hanya dalam meningkatkan pemahaman mereka tetapi juga memastikan kesiapan dan kepatuhan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan kebijakan perpajakan..

SARAN

Diperlukan program edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami terkait dengan implikasi penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak secara keseluruhan. Penting untuk memberikan informasi yang transparan terkait keamanan data pribadi yang terkait dengan penggunaan NIK dalam transaksi perpajakan. Hal ini akan membantu meredakan kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian wajib pajak terkait privasi mereka.

Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait dengan konsekuensi perpajakan dari penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Hal ini dapat dilakukan melalui panduan atau informasi yang jelas dari pihak berwenang. Serta membangun mekanisme umpan balik dari wajib pajak kepada lembaga terkait atau instansi perpajakan akan membantu dalam memahami kebutuhan dan kekhawatiran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. D. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 505-516.
- Chelsya. (2023). Persepsi Mahasiswa terhadap Peraturan Pemadaman NIK menjadi NPWP dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 102-117.
- Nugroho, R. H. (2014). Measurement model of service quality, regional tax regulations, taxpayer satisfaction level, behavior and compliance using confirmatory factor analysis. *Word Applied Sciences Journal*, 56-61.
- Nugroho, R. H. (2014). Service Quality and Regional Taxpayer regulations Influence Taxpayer Satisfaction And Behavior Using Structural Equation Modeling Approach. *international Journal of Academic Research*, 198-203.